

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Dasril Radjah, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan I, Jakarta: Rieneka Cipta, 1994, hlm 6

Denny Sutejo, Heri Kusmanto dkk, *Implementasi Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur*, Aceh, 2020, hlm 4

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, edisi pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 40 organisasi perangkat daerah

Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009, hlm. 19

L.P.H.N Pola umum Penelitian Hukum dan Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian Hukum Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Jakarta, 2016

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008, hlm 58

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Galia Indonesia, 1981, hal 11

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2014 hlm 3

Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia*, Bandung, 2020, hlm i

Sri Handriana Dewi Astuti, *Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan di Era Digital*, Lombok, 2020, hlm 20

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 4

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian di bidang Hukum*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 2011. hal. 11

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.10.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, edisi kedua, Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm 48

Wawancara dengan Kepala Bidang DUKCAPIL Tanah Datar bagian Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Mei 2023 pukul 14.00

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tanah Datar 01 Juni 2023 pukul 13.00

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## **C. Karya Ilmiah**

Claudia Mariska Putri, 2020, Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan sumber daya manusia terhadap keterlandaran laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Yogyakarta, 2020, hlm 9

Dewi Kurniasih dan Agus Subagyo dkk, 2016, Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi : Vol. VI No 1, 2016, hlm 128.

Konsep keadilan bermartabat dilahirkan dan digagas oleh Teguh Prasetyo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan)

Kriekhoff dan Valerine, 2005, Menjajagi Penggunaan Projective Test dalam Penelitian Hukum, Majalah Hukum dan Pembangunan, nomor 5 tahun ke VIII, September, 2005.hal. 14

Noor Vika Hizviani, 2021, Rancangan Aplikasi Data Balikan pada Kementrian Dalam Negeri, Universitas Gunadarma, Depok, hlm 43

Tubagus Muhammad Nasarudin, 2016, Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan, Jurnal Hukum : Vol. 7 No 2, 2016, hlm 141.

## **D. Arsip Pemerintah**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Datar, <https://dukcapil.tanahdatar.go.id/>

Hak Akses Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar, <https://disdukcapil.tanahdatarkab.go.id/article/hak-akses-dan-pemanfaatan-data-kependudukan, 2022>

Hak Akses Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar 2022 <https://disdukcapil.tanahdatarkab.go.id/article/hak-akses-dan-pemanfaatan-data-kependudukan>

Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota DUKCAPIL Tanah Datar

## E. Website

Diky Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara, <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>, di akses pada 20 Juli 2023 jam 01.47.

<https://news.republika.co.id/berita/r4rnyu487/ombudsman-temukan-empat-masalah-penyaluran-bansos-kemensos-perbaikan-ditunggu-30-hari>

[www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) diakses pukul 01.32 WIB tanggal 08 maret 2023

